

BAB IV

ANALISIS

A. Problem-problem Sosial dalam Kumpulan Puisi *Aku Ingin Jadi*

Peluru

1. Kemiskinan

Kemiskinan muncul sebagai problem sosial karena adanya ketidakmampuan suatu masyarakat tertentu dalam mencukupi standar kehidupan. Suatu masyarakat yang miskin dapat diketahui dari tidak menjangkaunya kemampuan ekonomi masyarakat tertentu dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Dalam kumpulan puisi *Aku Ingin Jadi Peluru* terdapat puisi-puisi yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat tersebut antara lain.

a. Nyanyian Abang Becak

Dalam puisi *Nyanyian Abang Becak*, syair-syair yang memaparkan adanya kemiskinan adalah pada bait I baris 1-9, bait II baris 10-14, dan bait IV baris 28-33.

jika harga minyak *mundhak* simbok
 semakin *ajeg*
 berkelahi sama bapak
 harga minyak *mundhak* lombok-lombok
 akan *mundhak*
 sandang pangan akan *mundhak*
 maka terpaksa tukang-tukang *lebon*

lintah darat bank *plecit* tukang kredit
harus dilayani

(Wiji Thukul, 2004: 35)

Penggalan puisi *Nyanyian Abang Becak* bait I baris 1-9 di atas menceritakan potret penderitaan sebuah keluarga tukang becak akibat kebijaksanaan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Akibat kenaiknya harga BBM, secara otomatis harga-harga kebutuhan bahan pokok ikut mengalami kenaikan. Jika seorang tukang becak hanya mengandalkan penghasilannya saja, sudah tentu tidak akan mencukupi segala kebutuhan. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka terpaksa berhutang kepada lintah darat, yang tentunya semakin menambah penderitaan masyarakat miskin.

Dalam penggalan puisi *Nyanyian Abang Becak* bait II baris 10-14, dan bait IV baris 28-33, terdapat masalah sosial yang diakibatkan karena kondisi miskin tersebut, yakni pertengkaran dalam rumah tangga dan adanya hasrat untuk berhutang kepada lintah darat. Kedua hal tersebut timbul karena kondisi ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

siapa tidak marah jika kebutuhan hidup semakin
mendesak, seribu lima ratus uang belanja
tertinggi dari bapak untuk simbok, siapa bisa
mencukupi sedangkan kebutuhan hidup semakin
mendesak

lampu butuh menyala, menyala butuh minyak
perut butuh kenyang, kenyang butuh diisi

namun bapak cuma abang becak!
maka apabila becak pusaka pulang
tanpa membawa uang
simbok akan kembali mengajak berkelahi bapak

(Wiji Thukul, 2004: 35)

Dalam puisi *Nyanyian Abang Becak* di atas, dapat diketahui potret kehidupan masyarakat miskin, khususnya sebuah keluarga tukang becak yang harus berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah-tengah kebijaksanaan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Konteks sosial puisi *Nyanyian Abang Becak* dibuat pada tahun 1984. Pada tahun itu, pemerintah Soeharto mempunyai kebijaksanaan menaikkan harga BBM. Dampak kenaikan BBM ini semakin menambah penderitaan yang dialami oleh tukang becak. Dari kebutuhan hidup yang akan ikut naik, penghasilan tukang becak yang terus menurun, dan kebutuhan hidup yang terus mendesak dan mencekik karena melambungnya harga sembako. Puisi *Nyanyian Abang Becak* merupakan respon sosial yang memotret dampak kenaikan BBM yang dialami keluarga tukang becak yang tidak lain adalah keluarga penyair sendiri.

b. Apa yang Berharga dari Puisiku

Puisi *Apa yang Berharga dari Puisiku* mengungkapkan kemiskinan yang menimpa keluarga penyair dan orang-orang di lingkungan sekitar penyair. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang serba kekurangan

(<http://ebsoft.web.id>). Dalam puisi *Apa yang berharga dari Puisiku*, kondisi miskin tampak pada penggalan puisi berikut ini.

Apa yang berharga dari puisiku
Kalau adikku tak berangkat sekolah
karena belum membayar SPP

(Wiji Thukul, 2004: 51)

Pada penggalan puisi di atas, keadaan miskin tampak ketika adik penyair tidak sekolah karena tidak mampu membayar SPP. Ketidakmampuan keluarga penyair membayar SPP merupakan bukti adanya kemiskinan.

Apa yang berharga dari puisiku
Kalau becak bapakku tiba-tiba rusak
Jika nasi harus dibeli dengan uang
Jika kami harus makan
Dan jika yang dimakan tidak ada?

(Wiji Thukul, 2004: 51)

Bait I baris 4-8 dalam puisi *Apa yang Berharga dari Puisiku* di atas merupakan gambaran ketidakmampuan keluarga penyair untuk memperbaiki becak keluarga yang rusak dan membeli makan. Penyair memaparkan bahwa keluarganya tidak mempunyai uang untuk memperbaiki becak dan membeli makan, sehingga tidak ada makanan yang bisa dimakan.

Apa yang berharga dari puisiku
Kalau bapak bertengkar dengan ibu
Ibu menyalahkan bapak
Padahal becak-becak terdesak oleh bis kota
Kalau bis kota lebih murah siapa yang salah?

(Wiji Thukul, 2004: 51)

Bait I baris 9-13 dalam puisi *Apa yang Berharga dari Puisiku* di atas memaparkan adanya kemiskinan yang sering menyebabkan timbulnya pertengkaran di dalam keluarga penyair, yakni ketika ayah penyair tidak membawa penghasilan yang cukup setelah menarik becak seharian. Kurangnya penghasilan tersebut disebabkan oleh hadirnya keberadaan bus kota bus kota yang semakin menggeser peran becak sebagai alat transportasi pilihan rakyat. Masyarakat lebih memilih menggunakan bus kota karena selain lebih cepat, tarif bus kota juga relatif lebih murah dibandingkan dengan becak yang bertenaga manusia. Maka dari itu, keberadaan bus kota dinilai tukang becak akan mengancam hidup mereka dan keluarganya.

Apa yang berharga dari puisiku
Kalau ibu *dijiret* utang
Kalau tetangga *dijiret* utang?

(Wiji Thukul, 2004: 51)

Keadaan miskin tampak pada bait I baris 14-16 dalam puisi *Apa yang Berharga dari Puisiku* di atas, yakni ketika ibu dan tetangga penyair dijerat utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Apa yang berharga dari puisiku
Kalau kami terdesak mendirikan rumah
Di tanah-tanah pinggir selokan
Sementara harga tanah semakin mahal
Kami tak mampu membeli
Salah siapa kalau kami tak mampu beli tanah?

(Wiji Thukul, 2004: 51)

Keadaan miskin tampak pada bait I baris 17-22 dalam puisi *Apa yang Berharga dari Puisiku* di atas, yakni ketika penyair dan orang-orang di sekitarnya terdesak mendirikan rumah di tanah-tanah pinggir selokan karena adanya penggusuran yang dilakukan pemerintah pada waktu itu. Harga tanah yang mahal tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kecil, sehingga mereka terpaksa mendirikan rumah di tanah-tanah pinggir selokan.

Apa yang berharga dari puisiku
Kalau orang sakit mati di rumah
Karena rumah sakit yang mahal?

(Wiji Thukul, 2004: 51)

Keadaan miskin tampak pada bait I baris 23-25 dalam puisi *Apa yang Berharga dari Puisiku* di atas, yakni ketika orang sakit mati di rumah karena tak mampu membayar biaya rumah sakit. Adanya biaya berobat ke rumah sakit yang mahal menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat berobat ke rumah sakit, sehingga banyak di antara mereka yang terpaksa mati di rumah.

Apa yang bisa kuberikan dalam kemiskinan
Yang menjiret kami?

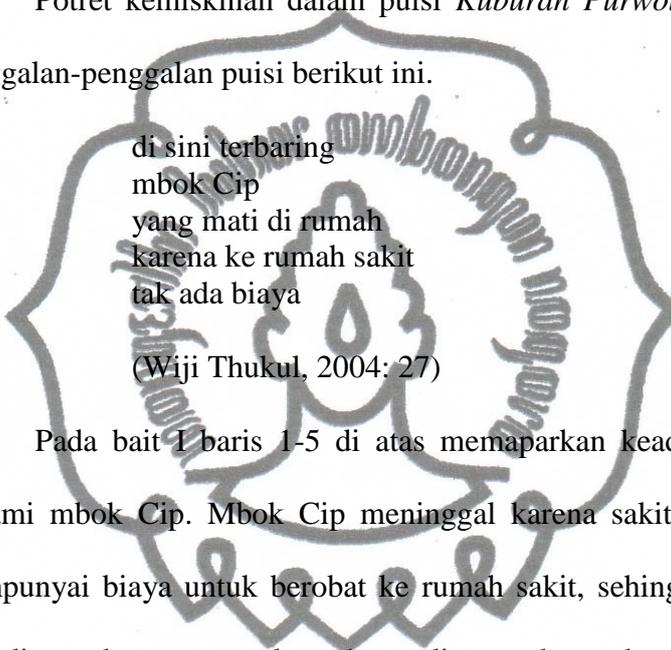
(Wiji Thukul, 2004: 52)

Bait I baris 28-29 dalam puisi *Apa yang Berharga dari Puisiku* di atas menyatakan penyair dan orang-orang di sekitarnya dijerat kemiskinan.

Hal itu menunjukkan bahwa di lingkungan sekitar penyair masih jauh dari kata sejahtera.

c. Kuburan Purwoloyo

Potret kemiskinan dalam puisi *Kuburan Purwoloyo* tampak pada penggalan-penggalan puisi berikut ini.



di sini terbaring
mbok Cip
yang mati di rumah
karena ke rumah sakit
tak ada biaya

(Wiji Thukul, 2004: 27)

Pada bait I baris 1-5 di atas memaparkan keadaan miskin yang dialami mbok Cip. Mbok Cip meninggal karena sakit dan beliau tidak mempunyai biaya untuk berobat ke rumah sakit, sehingga dia harus rela mati di rumahnya tanpa ada usaha medis yang berusaha menolongnya.

di sini terbaring
pak Pin
yang mati terkejut
karena rumahnya tergusur

(Wiji Thukul, 2004: 27)

Pada bait II baris 6-9 di atas memaparkan keadaan miskin yang dialami Pak Pin. Pak Pin meninggal karena beliau menjadi korban penggusuran tanah yang dilakukan pemerintah. Setelah mengetahui rumahnya menjadi salah satu korban penggusuran tanah yang dilakukan pemerintah, Pak Pin terkejut dan meninggal.

di tanah ini
terkubur orang-orang yang
sepanjang hidupnya memburuh
terhisap dan menanggung hutang

(Wiji Thukul, 2004: 27)

Pada bait III baris 10-13 di atas memaparkan keadaan masyarakat yang sepanjang hidupnya bekerja sebagai buruh dan menanggung utang. Memburuh dan menanggung utang merupakan potret keadaan miskin yang tampak pada puisi *Kuburan Purwoloyo*.

Kejadian-kejadian di atas merupakan potret kehidupan orang-orang miskin yang harus rela meregangkan nyawanya dengan cara-cara yang tidak mungkin dialami jika mereka termasuk golongan orang yang mampu. Jika memiliki uang, mbok Cip akan segera berobat ke rumah sakit, sehingga dia mungkin bisa tertolong dari kematian. Sedangkan, jika Pak Pin adalah orang kaya, mungkin dia tidak akan terkena dampak penggusuran tanah yang dilakukan pemerintah karena rumahnya pasti terbebas dari penggusuran dan walaupun digusur pun dia akan membeli rumah yang baru jika ada biaya.

Uraian mengenai *Kuburan Purwoloyo* di atas menandakan bahwa di zaman Orde Baru banyak rakyat yang menderita karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah, terjadi penggusuran di mana-mana, dan juga kehidupan buruh yang tidak manusiawi dengan gaji yang kecil hingga harus berhutang ke sana-sini.

d. Nyanyian Akar Rumput

Puisi *Nyanyian Akar Rumput* memotret penderitaan yang dialami rakyat miskin yang terkena dampak kebijakan pembangunan pemerintah yang pada waktu itu terkenal dengan program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Program tersebut menitik beratkan pada perubahan masyarakat agraris menuju industrialis. Industrialisasi yang menggejala di mana-mana telah menggusur lahan petani kecil hingga mencapai 1 juta hektar. Kebijakan pembangunan hanya terpusat di kota-kota pulau Jawa yang menyebabkan pula ketimpangan dan kesenjangan dengan daerah-daerah lainnya. Dampak dari kebijaksanaan tersebut mengakibatkan penggusuran dan pembebasan lahan atas nama pembangunan menuju tinggal landas

(<http://cscs-indonesia.blogspot.com/2008/09/realisme-sosialis-dalam-kumpulan-puisi.html>).

Dalam puisi *Nyanyian Akar Rumput*, potret kehidupan miskin tampak pada bait I baris 1-8 berikut ini.

jalan raya dilebarkan
kami terusir
mendirikan kampung
digusur
kami pindah-pindah
menempel di tembok-tembok
dicabut
terbuang

(Wiji Thukul, 2004: 9)

commit to user

Pada bait tersebut dijelaskan bahwa masyarakat kecil terusir, terkena penggusuran rumah, sehingga mereka harus hidup berpindah-pindah dan menempel pada tembok-tembok. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya problem sosial yakni kemiskinan, yang mana masyarakat tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal, sehingga harus rela hidup berpindah-pindah dan menempel di tembok-tembok. Kasus penggusuran tanah di berbagai daerah pada waktu itu telah menjadikan tidak kurang dari 3.000.000 jiwa rakyat menjadi korban penggusuran (<http://nikolaskristiyantosj.wordpress.com/2012/08/09/wiji-thukul-sastra-pembebasan/>). Selain penggalan puisi di atas, kondisi miskin juga dipaparkan penyair dalam penggalan puisi *Nyanyitan Akar Rumput* bait II baris 9-13 berikut ini.

kami rumput
butuh tanah
dengar !
Ayo gabung ke kami
Biar jadi mimpi buruk presiden !

(Wiji Thukul, 2004: 9)

Pada penggalan puisi di atas penyair mengumpamakan dirinya dan orang-orang yang senasib dengannya dengan kata “rumput” karena nasib yang mereka alami sama dengan rumput. Mereka dicabut, terbuang, menempel di tembok-tembok, dan mereka juga butuh tanah, seperti halnya rumput. Mereka merasa bernasib seperti halnya rumput karena mereka

digusur dari rumahnya sendiri seperti halnya rumput yang dicabut dari tanah tempat mereka tumbuh dan hidup.

Suatu masyarakat yang miskin dapat diketahui dari tidak menjangkaunya kemampuan ekonomi masyarakat tertentu dalam memenuhi kebutuhan primer, salah satunya adalah kebutuhan akan adanya papan atau tempat tinggal. Maka, penggalan puisi di atas mencerminkan adanya kondisi miskin yang dialami masyarakat karena tidak mempunyai tempat tinggal.

e. Bunga dan Tembok

Konteks sosial yang terdapat dalam puisi *Bunga Dan Tembok* yang dibuat dalam kisaran tahun 1987 sampai 1988 adalah pada tahun tersebut pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan dengan menggusur rumah-rumah penduduk untuk dijadikan lahan industri dan pembebasan tanah dengan merampas tanah dari penduduk (<http://setyo-negoro.blogspot.com/2007/05/jejak-jejak-realisme-sosialis-di.html>).

Persistiwa pada kisaran tahun 1987-1988 ini dipotret penyair dalam puisi *Bunga Dan Tembok* dengan menggunakan bahasa kiasan “bunga” dan “tembok”. Kata “bunga” digunakan penyair untuk mengiaskan suatu kelompok rakyat kecil, sedangkan kata “tembok” digunakan penyair untuk mengiaskan makna penguasa. Dalam puisi *Bunga dan Tembok*, potret kemiskinan tampak pada syair-syair puisi berikut ini.

seumpama bunga
kami adalah bunga yang tak
kau kehendaki tumbuh
engkau lebih suka membangun
rumah dan merampas tanah

(Wiji Thukul, 2004: 73)

Pada bait I baris 1-5 di atas memaparkan adanya penderitaan yang dialami rakyat miskin karena pemerintah lebih suka membangun rumah dan merampas tanah mereka untuk pembangunan. Penggalan puisi di atas mencerminkan adanya kemiskinan yaitu ketika masyarakat tidak mempunyai rumah dan tanah untuk tempat tinggal. Rumah dan tanah mereka digusur dan dirampas untuk pembangunan. Penyair mengandaikan dirinya atau kelompok yang disuarakan sebagai “bunga”, yaitu sesuatu yang bisa tumbuh, berkembang, dan bisa rontok.

seumpama bunga
kami adalah bunga yang tak
kau kehendaki adanya
engkau lebih suka membangun
jalan raya dan pagar besi

(Wiji Thukul, 2004: 73)

Pada bait II baris 6-10 di atas memaparkan penderitaan rakyat miskin karena pemerintah lebih suka membangun jalan dan gedung-gedung mewah daripada keberadaan mereka. Kondisi miskin dalam penggalan puisi di atas tampak ketika penguasa lebih memilih menggusur rumah dan merampas tanah rakyat untuk membangun jalan raya dan

gedung-gedung. Akibatnya, banyak rakyat mengalami kemiskinan karena tidak mempunyai tempat tinggal.

seumpama bunga
kami adalah bunga yang
dirontokkan di bumi kami sendiri

(Wiji Thukul, 2004: 73)

Pada bait III baris 11-13 di atas memaparkan penderitaan rakyat miskin yang diusir dari tanahnya sendiri. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal akibat penggusuran dan perampasan tanah yang dilakukan pemerintah. Rakyat digusur dari tanahnya sendiri, sehingga mereka merasa “dirontokkan di bumi sendiri”.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Pada awal Orde Baru mulai tampak adanya pertumbuhan kembali iklim kebebasan berserikat dan berpendapat. Pemerintah mulai merasa perlu adanya legitimasi dan partisipasi. Terasa bahwa ada semacam hubungan yang dekat antara pemerintah dan rakyat. Hanya saja sayangnya kedekatan itu hanyalah edekatan pada masa bulan madu. Setelah itu, ketika pemerintah mulai berbicara soal pembangunan dulu, baru pembangunan melalui pelita-pelita, hubungan bulan madu itu mulai retak. Kebebasan berserikat mulai dibatasi tidak saja bagi pegawai negeri tetapi justru bagi masyarakat melalui kebijaksanaan *Floating mass* (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994: 110).

commit to user

Dalam hal menyatakan pendapat banyak ditemui batasan-batasan, yakni ada semacam kebijaksanaan agar menggunakan saluran-saluran institusional dalam menyatakan pendapat. Jika masyarakat ingin memakai saluran non-institusional maka haruslah lebih moderat, lebih *tepo seliro* (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994: 111). Masyarakat tetap diminta toleran membiarkan pembangunan lebih dulu, dan belakangan baru berbicara soal pemerataan dan HAM. Pemerintah betul-betul serius dengan kebijaksanaannya. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya tindakan keras pemerintah terhadap pers yang berani berpendapat lain dengan pemerintah.

Dalam kumpulan puisi *Aku Ingin Jadi Peluru*, kejahatan terhadap kemanusiaan ditemukan diantaranya adalah penggusuran rumah dan perampasan tanah secara paksa dan perampasan kemerdekaan berbicara. Kedua problem sosial tersebut tampak pada syair-syair puisi berikut ini.

a. Kuburan Purwoloyo

Kuburan Purwoloyo dibuat pada tahun 1988. Pada kisaran tahun pembuatan puisi tersebut, pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan dengan menggusur rumah-rumah penduduk untuk dijadikan lahan industri dan pembebasan tanah dengan merampas tanah dari penduduk. (<http://cscs-indonesia.blogspot.com/2008/realisme-sosialis-dalam-kumpulan-puisi.html>). Dalam puisi *Kuburan Purwolyo* terdapat adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni penggusuran rumah yang dilakukan oleh pemerintah. Hal yang

memaparkan adanya kejahatan tersebut antara lain terdapat dalam bait II baris 6-9 berikut ini.

di sini terbaring
pak Pin
yang mati terkejut
karena rumahnya tergusur

(Wiji Thukul, 2004: 27)

Dalam penggalan puisi di atas, pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam menggusur rumah dan merampas tanah. Penggusuran rumah tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan dalam kategori pengusiran penduduk secara paksa. Pengusiran penduduk secara paksa merupakan pelanggaran HAM yang mencakup pelanggaran hak milik dan pelanggaran hak atas kehidupan yang layak.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Dalam penggalan puisi *Kuburan Purwoloyo* di atas, memaparkan adanya perampasan rumah yang dilakukan pemerintah secara paksa yang tampak pada bait II baris 9. Di situ dijelaskan bahwa Pak Pin mati terkejut karena mengetahui rumahnya tergusur. Hal itu menandakan adanya pelanggaran terhadap pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut

commit to user

dengan memberi ganti kerugian yang layak. Berkaitan dengan pasal tersebut, diketahui bahwasanya tidak ada pemberian ganti rugi yang layak kepada Pak Pin karena pengusuran rumah tersebut, akibatnya Pak Pin mati karena terkejut. Keadaan tersebut menunjukkan realita kehidupan bahwa pengusuran rumah yang dilakukan pemerintah membawa dampak buruk bagi kaum miskin.

Selain pelanggaran hak milik, pengusuran rumah merupakan pelanggaran hak atas kehidupan yang layak. Dalam pasal 40 Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta bekehidupan yang layak. Kehidupan yang layak, minimal terpenuhinya kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan rumah. Maka, dengan adanya pengusuran rumah yang dilakukan pemerintah, membuktikan adanya kehidupan yang tidak layak seperti yang dialami Pak Pin. Pak Pin kehilangan rumahnya sebagai satu-satunya tempat tinggal.

b. Peringatan

Dalam puisi *Peringatan* terdapat adanya kejahatan kemanusiaan, yakni perampasan kemerdekaan berbicara. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggalan puisi *Peringatan* pada bait III baris 9-13 berikut ini.

bila rakyat tidak berani mengeluh
itu artinya sudah gawat
**dan bila omongan penguasa
tidak boleh dibantah
kebenaran pasti terancam**

(Wiji Thukul, 2004: 77)

Penggalan puisi di atas memaparkan adanya perampasan kemerdekaan yang dilakukan penguasa. Perampasan kemerdekaan yang dimaksud adalah perampasan kemerdekaan bersuara dan menyatakan pendapat. Rakyat dilarang berbicara hal yang bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan penguasa. Dalam penelitian ini, Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam hak mengajukan pendapat, sesuai pasal 44 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap orang, baik sendiri maupun bersama-sama berhak menyatakan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

Adanya perampasan kemerdekaan yang dilakukan pemerintah dalam puisi Peringatan semakin dikuatkan dengan penggalan puisi pada bait IV baris 14-17 berikut ini.

apa yang sudah menjadi keputusan penguasa.
apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan!

(Wiji Thukul, 2004: 77)

Penggalan puisi di atas memaparkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah, yakni dalam mengekang kebebasan berbicara rakyat. Pemerintah tidak mau menerima saran dan kritik dari

rakyat karena apapun yang diperintahkan tidak boleh dibantah. Hal ini digambarkan penyair sebagai suatu situasi yang gawat, sebab penguasa akan dengan leluasa melakukan tindakan sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa memikirkan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Semua kebijakan dan perintah penguasa harus dipedulikan dan dituruti rakyat.

c. Bunga dan Tembok

Konteks sosial yang terdapat dalam puisi *Bunga Dan Tembok* yang dibuat dalam kisaran tahun 1987 sampai 1988, yaitu pada kisaran tahun tersebut pemerintah gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan dengan menggusur rumah-rumah penduduk untuk dijadikan lahan industri dan pembebasan tanah dengan merampas tanah dari penduduk (<http://setyo-negoro.blogspot.com/2007/05/jejak-jejak-realisme-sosialis-di.html>). Hal tersebut dipaparkan dalam penggalan puisi *Bunga dan Tembok* pada bait I baris 1-5 berikut ini.

seumpama bunga
kami adalah bunga yang tak
kau kehendaki tumbuh
**engkau lebih suka membangun
rumah dan merampas tanah**

(Wiji Thukul, 2004: 73)

Penggalan puisi di atas menunjukkan adanya pengusuran dan perampasan tanah yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat kecil. Kata “bunga” digunakan untuk menyatakan suatu kelompok rakyat kecil, sedangkan kata “tembok” digunakan penyair sebagai simbol penguasa.

Penyair mengandaikan dirinya atau kelompok yang disuarakan sebagai “bunga”, yaitu sesuatu yang bisa tumbuh, berkembang, dan bisa rontok. Penyair menggunakan kata “tembok” sebagai simbol penguasa Orde Baru. “Tembok” adalah sesuatu yang berdiri tegak, kuat, dan keras.

Dalam penggalan puisi di atas, pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam menggusur rumah dan merampas tanah. Penggusuran rumah tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan dalam kategori pengusiran penduduk secara paksa. Pengusiran penduduk secara paksa merupakan pelanggaran HAM yang mencakup pelanggaran hak milik dan pelanggaran hak atas kehidupan yang layak.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang. Dalam puisi *Bunga dan Tembok* di atas, dijelaskan bahwa penguasa lebih suka merampas tanah rakyat untuk pembangunan daripada menghendaki adanya rakyat kecil. Hal itu menandakan adanya pelanggaran terhadap pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, mengenai hak milik, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang. Berkaitan dengan pasal tersebut, diketahui bahwasanya penguasa merampas tanah dengan sewenang-wenang dengan mengatasnamakan pembangunan.

Selain pelanggaran terhadap hak milik, penggusuran rumah merupakan pelanggaran hak atas kehidupan yang layak. Dalam pasal 40 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Selain itu, dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kehidupan yang layak, minimal terpenuhinya kebutuhan primer, salah satunya yaitu kebutuhan terhadap tempat tinggal. Maka dari itu, sikap penguasa yang melakukan penggusuran rumah-rumah rakyat kecil dengan dalih kebijaksanaan berarti pemerintah melakukan pelanggaran atas hak kehidupan yang layak karena rakyat jadi kehilangan tempat tinggalnya. Rakyat tidak mendapatkan ganti rugi yang layak yang dapat menggantikan apa yang telah diambil pemerintah.

Pelanggaran terhadap hak milik yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat kecil dan juga pelanggaran terhadap hak kehidupan yang layak dipaparkan dalam penggalan puisi *Bunga dan Tembok* pada bait II baris 6-10 berikut ini.

seumpama bunga
kami adalah bunga yang tak
kau kehendaki adanya
**engkau lebih suka membangun
jalan raya dan pagar besi**

(Wiji Thukul, 2004: 73)

commit to user

Dalam penggalan puisi di atas tampak bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki, penguasa menyalahgunakan dengan bertindak sewenang-wenang. Mereka menggusur rumah dan merampas tanah penduduk untuk pembangunan gedung-gedung dan pelebaran jalan tanpa mengindahkan nasib rakyat kecil.

d. Sajak Suara

Dalam puisi *Sajak Suara* terdapat adanya kejahatan kemanusiaan, yakni perampasan kemerdekaan berbicara. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggalan puisi *Sajak Suara* baris berikut ini.

**sesungguhnya suara itu tak bisa diredam
mulut bisa dibungkam**

namun siapa mau menghentikan nyanyian bimbang
dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku

**suara-suara itu tak bisa dipenjarakan
di sana bersemayam kemerdekaan**
apabila engkau memaksa diam
aku siapkan untukmu: pemberontakan !

(Wiji Thukul, 2004: 74)

Dalam penggalan puisi di atas, sikap sewenang-wenang yang dilakukan penguasa dalam membungkam kemerdekaan hak bersuara rakyat merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penguasa melakukan perampasan kemerdekaan bersuara dan menyatakan pendapat. Rakyat dilarang berbicara menyatakan pendapat yang bertentangan dengan ketetapan yang diambil penguasa. Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam hak mengajukan pendapat, sesuai pasal 44 Undang-undang Nomor

39, yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak menyatakan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

Adanya perampasan kemerdekaan yang dilakukan pemerintah dalam puisi *Sajak Suara* membuktikan adanya pelanggaran pasal 44 Undang-undang Nomor 39. Selain itu, penguasa juga melakukan pelanggaran pasal 28 UUD 1945, yakni mengenai kemerdekaan rakyat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan maupun tulisan (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994: 89). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa rakyat mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, tetapi pada kenyataannya sesuai dengan penggalan puisi di atas, penguasa tidak segan-segan mengokang senjatanya bagi rakyat yang berani bicara bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Syair “sesungguhnya suara itu tak bisa diredam, mulut bisa dibungkam” dan “suara-suara itu tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan” pada puisi *Sajak Suara* menjelaskan bahwasanya pada masa itu pemerintah berusaha meredam dan memenjarakan hak bicara rakyat. Jika rakyat melawan, pemerintah tak segan-segan mengokang senjatanya seperti pada syair berikut ini.

**sesungguhnya suara itu bukan perampok
yang ingin merayah hartamu
ia ingin bicara**

mengapa kau kokang senjata
dan gemetar ketika suara-suara itu
menuntut keadilan ?

(Wiji Thukul, 2004: 74)

e. Nyanyian Akar Rumput

Konteks sosial puisi *Nyanyian Akar Rumput* dilihat dari tahun pembuatan puisi, yakni pada bulan Juli tahun 1988 adalah masa di mana Orde Baru masih memegang tampuk kekuasaan di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kata "Presiden" dalam puisi *Nyanyian Akar Rumput* mengacu pada Presiden Soeharto yang waktu itu berkuasa.

Puisi *Nyanyian Akar Rumput* memotret penderitaan yang dialami masyarakat kecil yang terkena dampak kebijakan pembangunan pemerintah yang pada waktu itu terkenal dengan program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan menitik beratkan pada perubahan masyarakat agraris menuju industrialis. Dampak dari kebijakan tersebut mengakibatkan penggusuran rumah-rumah rakyat dan pembebasan lahan atas nama pembangunan menuju tinggal landas, sehingga banyak rakyat kecil yang menjadi korban kehilangan tempat tinggal (<http://cscs-indonesia.blogspot.com/2008/09/realisme-sosialis-dalam-kumpulan-puisi.html>). Seperti dalam penggalan puisi berikut ini.

jalan raya dilebarkan
kami terusir
mendirikan kampung
digusur
kami pindah-pindah

menempel di tembok-tembok
dicabut
terbuang

(Wiji Thukul, 2004: 9)

Bait I baris 1-8 di atas memaparkan adanya penggusuran rumah yang dilakukan pemerintah guna menjalankan kebijakan pemerintah, yakni melebarkan jalan raya. Dalam penggalan puisi di atas, pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam menggusur rumah-rumah rakyat kecil. Penggusuran rumah tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan dalam kategori pengusiran penduduk secara paksa. Pengusiran penduduk secara paksa merupakan pelanggaran HAM yang mencakup pelanggaran hak milik dan pelanggaran hak atas kehidupan yang layak.

Dalam puisi *Nyanyian Akar Rumput* di atas, dipaparkan bahwa adanya pelebaran jalan yang dilakukan pemerintah membuat rakyat kecil mengalami penggusuran rumah. Mereka terusir, berpindah-pindah, merasa dicabut dan terbuang dari tanahnya sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, mengenai hak milik, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang. Berkaitan dengan pasal tersebut, diketahui bahwasanya penguasa merampas tanah dengan sewenang-wenang dengan dalih pembangunan jalan raya.

Selain pelanggaran terhadap hak milik, penggusuran rumah merupakan pelanggaran hak atas kehidupan yang layak. Dalam pasal 40 UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Selain itu, dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kehidupan yang layak, minimal terpenuhinya kebutuhan primer, salah satunya yaitu kebutuhan terhadap tempat tinggal. Maka dari itu, jika penguasa melakukan penggusuran rumah berarti pemerintah melakukan pelanggaran atas hak kehidupan yang layak karena rakyat jadi kehilangan tempat tinggalnya tanpa menggantinya dengan ganti rugi yang layak.

3. Masalah generasi muda pada masyarakat modern

Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh adanya sikap melawan. Sikap melawan mungkin disertai dengan rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan menyimpang (Soerjono Soekanto, 1994:413). Dalam kumpulan puisi *Aku Ingin Jadi Peluru* karya Wiji Thukul, ditemukan puisi yang menggambarkan akan problem sosial tersebut, yakni mengenai sikap melawan terhadap pemerintahan pada saat itu, yakni pada era Orde Baru. Puisi-puisi yang menggambarkan sikap perlawanan tersebut antara lain.

a. Peringatan

commit to user

apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan !

(Wiji Thukul, 2004: 77)

Ketidakberdayaan masyarakat dalam menggunakan hak-haknya sebagai manusia ciptaan Tuhan, terbentuk akibat pola kebijakan penguasa saat itu yang sangat mengekang terhadap kehidupan masyarakat. Mereka tidak memberikan kebebasan bersuara untuk menyampaikan hal atau permasalahan kepada penguasa. Oleh karena itu, penyair melalui karya puisinya mencoba menggerakkan sikap perlawanan terhadap arogansi penguasa. Hal tersebut tampak pada bait IV baris terakhir penggalan puisi di atas “maka hanya ada satu kata: lawan !”.

b. Bunga dan Tembok

jika kami bunga
engkau adalah tembok
tapi di tubuh tembok itu
telah kami sebar biji-biji
suatu saat kami akan tumbuh bersama
dengan keyakinan: engkau harus hancur!

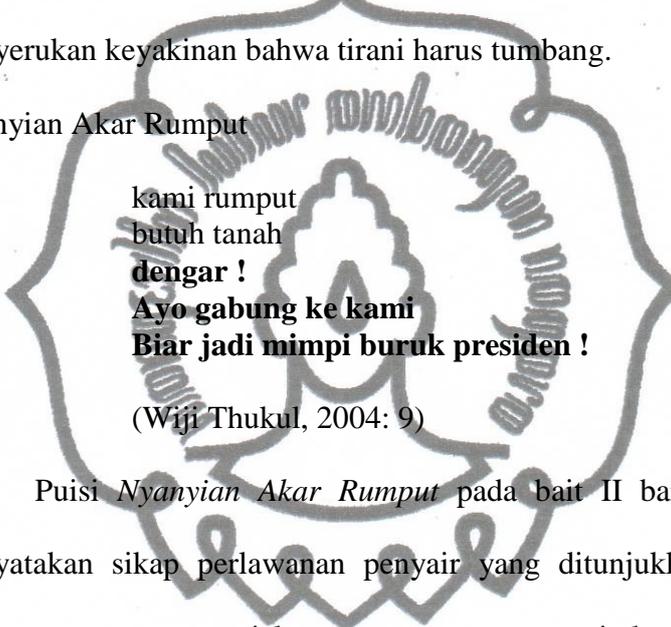
dalam keyakinan kami
di man pun –tirani harus tumbang !

(Wiji Thukul, 2004:73)

Dalam puisi *Bunga dan Tembok* di atas, penyair menyatakan sikap perlawanan terhadap penguasa karena kesewenang-wenangannya dalam melakukan penggusuran rumah dan perampasan tanah. Pada bait IV baris

19, penyair menyatakan sikap perlawanannya terhadap penguasa dengan keyakinan bahwa suatu saat, rakyat yang mereka tindas akan terus tumbuh dan menghancurkan tirani yang saat itu berjaya. Selain itu, pada bait V baris terakhir, penyair juga memaparkan perlawanannya dengan menyerukan keyakinan bahwa tirani harus tumbang.

c. Nyanyian Akar Rumput



kami rumput
butuh tanah
dengar !
Ayo gabung ke kami
Biar jadi mimpi buruk presiden !

(Wiji Thukul, 2004: 9)

Puisi *Nyanyian Akar Rumput* pada bait II baris 11-13 di atas menyatakan sikap perlawanan penyair yang ditunjukkan dalam bahasanya yang mengajak orang-orang yang tertindas untuk bergabung bersama melawan presiden. Penyair mengobarkan semangat untuk mengambil kembali hak-hak rakyat kecil yang telah dirampas penguasa. Penyair beranggapan bahwa dengan bersatu, mereka akan menjadi kuat dan membuat penguasa gentar.

d. Sajak Suara

suara-suara itu tak bisa dipenjarakan
di sana bersemayam kemerdekaan
apabila engkau memaksa diam
aku siapkan untukmu: pemberontakan !

(Wiji Thukul, 2004: 74)

commit to user

Pada bait II baris 8 penggalan puisi di atas, penyair mengungkapkan perlawanannya terhadap penguasa karena sikap mereka yang mengekang kemerdekaan berbicara rakyat. Penyair menegaskan, jika penguasa tetap memaksa diam, maka penyair siap melakukan pemberontakan. Selain itu, penyair juga menyatakan ancamannya bahwa dia akan terus memburu penguasa atas ketidakadilannya terhadap rakyat yang telah dirampas haknya. Hal itu dipaparkan dalam bait IV baris terakhir berikut ini.

sesungguhnya suara itu akan menjadi kata
ialah yang mengajari aku bertanya
dan pada akhirnya tidak bisa tidak
engkau harus menjawabnya
apabila engkau tetap bertahan
aku akan memburumu seperti kutukan

(Wiji Thukul, 2004: 74)

B. Respon Pengarang terhadap Problem-problem Sosial

1. Respon pengarang terhadap kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan yang serba kekurangan atau berpenghasilan rendah (<http://ebsoft.web.id>). Dalam kumpulan puisi *Aku Ingin Jadi Peluru*, penyair menganggap kemiskinan sebagai dampak atas kesewenang-wenangan penguasa. Hal itu tampak pada puisi *Nyanyian Abang Becak* berikut ini.

jika bbm kembali menginjak
namun juga masih disebut langkah-langkah

kebijaksanaan
maka aku tidak akan lagi memohon pembangunan
nasib
kepadamu duh Pangeran duh Gusti
sebab nasib adalah permainan kekuasaan

(Wiji Thukul, 2004: 36)

Dalam penggalan puisi di atas, pengarang menganggap bahwa kemiskinan adalah bagian dari permainan kekuasaan Orde Baru, dan bukan semata-mata anugerah dari Tuhan. Keadaan miskin dinilai pengarang sebagai akibat dari munculnya kebijaksanaan pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, seperti pada penggalan puisi *Apa yang Berharga dari Puisiku* berikut ini.

Apa yang berharga dari puisiku
Kalau bapak bertengkar dengan ibu
Ibu menyalahkan bapak
Padahal becak-becak terdesak oleh bis kota
Kalau bis kota lebih murah siapa yang salah?
Apa yang berharga dari puisiku
Kalau ibu *dijiret* utang
Kalau tetangga *dijiret* utang?
Apa yang berharga dari puisiku
Kalau kami terdesak mendirikan rumah
Di tanah-tanah pinggir selokan
Sementara harga tanah semakin mahal
Kami tak mampu membeli
Salah siapa kalau kami tak mampu beli tanah?
Apa yang berharga dari puisiku
Kalau orang sakit mati di rumah
Karena rumah sakit yang mahal?
Apa yang berharga dari puisiku
Yang kutulis makan waktu berbulan-bulan
Apa yang bisa kuberikan dalam kemiskinan
Yang *menjiret* kami?

(Wiji Thukul, 2004: 51)

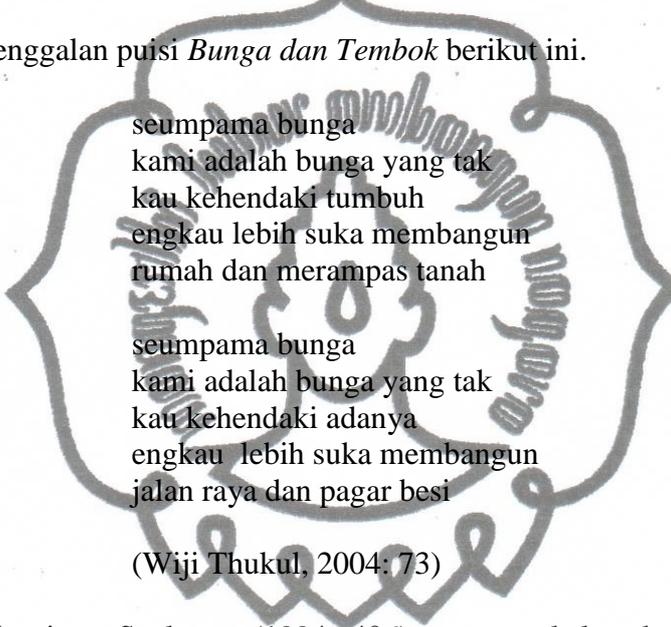
Pengarang beranggapan bahwa adanya bus kota yang mendesak kinerja becak, merupakan salah satu pemicu keadaan miskin. Tarif bus kota yang lebih murah dibandingkan becak, membuat masyarakat lebih memilih menggunakan bus kota daripada becak, sehingga keberadaan becak semakin terdesak, yang berarti keluarga tukang becak akan merasakan dampak dari keadaan tersebut. Kurangnya penghasilan tukang becak menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan primer keluarga, sehingga mereka pun terdesak untuk berhutang demi kelangsungan hidup.

Program pemerintah Orde Baru dalam pembangunan gedung-gedung dan pelebaran jalan juga dinilai pengarang sebagai program yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin karena dengan adanya program tersebut, rumah-rumah masyarakat miskin terkena penggusuran. Sehingga, masyarakat yang sudah miskin menjadi semakin miskin karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan hidup berpindah-pindah. Keadaan tersebut juga tampak pada penggalan puisi *Nyanyian Akar Rumput* berikut.

jalan raya dilebarkan
kami terusir
mendirikan kampung
digusur
kami pindah-pindah
menempel di tembok-tembok
dicabut
terbuang

(Wiji Thukul, 2004: 9)

Kemiskinan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap pengarang sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin juga terdapat pada puisi berikut ini, yakni adanya penggusuran rumah dan perampasan tanah, guna kepentingan pembangunan. Hal tersebut tertuang dalam penggalan puisi *Bunga dan Tembok* berikut ini.



seumpama bunga
kami adalah bunga yang tak
kau kehendaki tumbuh
engkau lebih suka membangun
rumah dan merampas tanah
seumpama bunga
kami adalah bunga yang tak
kau kehendaki adanya
engkau lebih suka membangun
jalan raya dan pagar besi

(Wiji Thukul, 2004: 73)

Soerjono Soekanto (1994: 406) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat membenci kemiskinan adalah kesadarannya bahwa mereka telah gagal dalam memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.

Ketidakadilan yang dirasakan pengarang adalah di saat apa yang sudah menjadi hak masyarakat dirampas oleh pemerintah. Adanya hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan penghidupan yang layak sesuai UUD 1945 ternyata hanyalah janji pemerintah. Seperti pada penggalan puisi *Kuburan Purwoloyo* berikut ini.

di sini terbaring
mbok Cip
yang mati di rumah
karena ke rumah sakit
tak ada biaya

di sini terbaring
pak Pin
yang mati terkejut
karena rumahnya tergusur
.....
dan keadilan masih saja hanya janji

di sini
kubaca kembali
: sejarah kita belum berubah !

(Wiji Thukul, 2004: 27)

Kemiskinan bagi pengarang bukanlah takdir, melainkan akibat dari permainan kekuasaan Orde Baru yang mengatas namakan kebijaksanaan. Kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pelebaran jalan dengan cara menggusur rumah dan merampas tanah-tanah masyarakat menjadi salah satu sebab munculnya masyarakat miskin. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM tanpa ada solusi bagi rakyat miskin juga dinilai salah satu hal yang membebani dan memperkuat kemiskinan yang dialami masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mengganti tenaga manusia dengan mesin, seperti keberadaan bis kota yang lebih murah daripada becak, juga merupakan salah satu sebab rakyat miskin, khususnya tukang becak semakin terdesak karena penghasilan yang mereka dapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan primer keluarga. Maka, dengan terpaksa,

commit to user

mereka harus berhutang kepada lintah darat yang tentunya semakin menambah penderitaan rakyat miskin.

Respon pengarang terhadap kemiskinan yang diakibatkan oleh hal-hal di atas adalah pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang telah menjadi hak kita. Pengarang menganggap kemiskinan adalah akibat dari sistem pemerintahan yang tidak berpihak, sehingga butuh perjuangan untuk menaklukkan sistem tersebut dan butuh keberanian untuk memperjuangkan hak-hak kita.

2. Respon pengarang terhadap kejahatan kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penelitian ini mencakup pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yaitu adanya pengusuran rumah-rumah penduduk dan perampasan tanah, dan perampasan kemerdekaan bersuara. Berikut ini merupakan respon pengarang terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah.

a. Respon pengarang terhadap pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa

Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa dalam penelitian ini mengacu pada pengusuran rumah dan perampasan tanah yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang mencakup pelanggaran terhadap hak milik dan pelanggaran hak atas kehidupan yang layak.

Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, apabila terjadi pencabutan hak milik, maka seharusnya pemerintah memberi ganti kerugian yang layak, tetapi pada kenyataannya masyarakat yang menjadi korban penggusuran rumah dan perampasan tanah harus hidup menempel di tembok-tembok. Hal tersebut merupakan pelanggaran pemerintah terhadap perolehan kehidupan yang layak karena dengan tidak memiliki tempat tinggal berarti rakyat tidak hidup secara layak. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak diatur dalam pasal 40 Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Berikut merupakan respon pengarang terhadap penggusuran rumah dan perampasan tanah yang dilakukan pemerintah.

jika kami bunga
engkau adalah tembok
tapi di tubuh tembok itu
telah kami sebar biji-biji
suatu saat kami akan tumbuh bersama
dengan keyakinan: engkau harus hancur!

dalam keyakinan kami
di man pun –tirani harus tumbang !

(Wiji Thukul, 2004: 73)

Dalam penggalan puisi *Bunga dan Tembok* di atas, pengarang menunjukkan sikap menentang dan melawan terhadap kesewenang-wenangan penguasa dalam merampas tanah dan menggusur rumah. Pengarang menyerukan keyakinannya bahwa tirani harus hancur dan

commit to user

tumbang. Hal tersebut tampak pada bait IV baris terakhir dan bait V baris terakhir.

kami rumput
butuh tanah
dengar !
Ayo gabung ke kami
Biar jadi mimpi buruk presiden !

(Wiji Thukul, 2004: 9)

Dalam penggalan puisi *Nyanyian Akar Rumput* di atas, respon pengarang terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang telah merampas tanah dan mengusur rumah rakyat adalah melakukan perlawanan, yakni dengan menggalang kekuatan agar rakyat bersatu melakukan perlawanan dan menggentarkan presiden.

b. Respon pengarang terhadap perampasan kemerdekaan bersuara

Perampasan kemerdekaan bersuara merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan penguas Orde Baru pada masa itu. Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam hak mengajukan pendapat, sesuai pasal 44 Undang-undang Nomor 39, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

Pada masa itu, kemerdekaan bersuara sangat dibatasi. Hal-hal yang bertentangan dengan kebijaksanaan dan keputusan pemerintah tidak dihiraukan. Keadaan yang *commit to user* memancing respon pengarang dalam

menghadapi arogansi penguasa. Berikut ini adalah respon pengarang terhadap tidak adanya kebebasan rakyat bicara.

apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan!

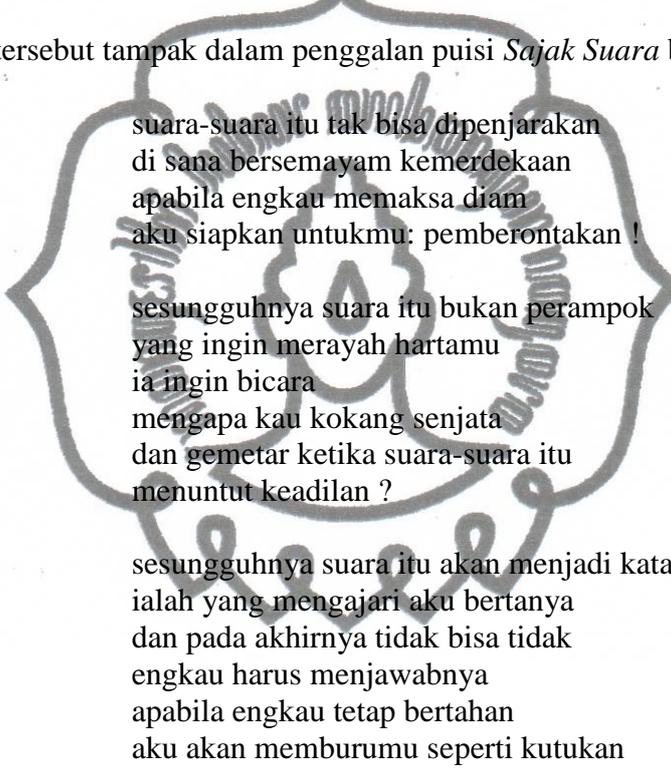
(Wiji Thukul, 2004: 77)

Puisi *Peringatan* merupakan bentuk peringatan pengarang terhadap pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyat dengan tidak menghiraukan saran dan kritik dari rakyat. Penyair memberi peringatan kepada pemerintah, dan manakala tanda-tanda peringatan tidak dihiraukan pemerintah, malah justru membungkam orang-orang kritis seperti pengarang, maka pengarang menyerukan dengan tekad bulat untuk melawan pemerintah. Dalam penggalan puisi di atas tampak jelas bahwa pengarang menyatakan sikapnya untuk melawan kesewenang-wenangan penguasa yang mengekang kemerdekaan rakyat untuk berbicara. Penguasa menuduh rakyat yang berani bicara yang berlawanan dengan sikap penguasa dengan sebutan subversive, yaitu gerakan atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang.

Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan penguasadalama membungkam mulut rakyat dan dengan kekuatannya memaksa rakyat untuk diam menggugah pengarang untuk melakukan pemberontakan.

commit to user

Penguasa tidak segan-segan mengokang senjatanya bagi rakyat yang berani bicara, walaupun sekedar menuntut keadilan, karena hal tersebut dianggap melawan pemerintahan. Maka, dengan lantang, pengarang menyatakan ancamannya untuk memburu rezim tersebut seperti kutukan. Hal tersebut tampak dalam penggalan puisi *Sajak Suara* berikut ini.



suara-suara itu tak bisa dipenjarakan
di sana bersemayam kemerdekaan
apabila engkau memaksa diam
aku siapkan untukmu: pemberontakan !

sesungguhnya suara itu bukan perampok
yang ingin merayah hartamu
ia ingin bicara
mengapa kau kokang senjata
dan gemetar ketika suara-suara itu
menuntut keadilan ?

sesungguhnya suara itu akan menjadi kata
ialah yang mengajari aku bertanya
dan pada akhirnya tidak bisa tidak
engkau harus menjawabnya
apabila engkau tetap bertahan
aku akan memburumu seperti kutukan

(Wiji Thukul, 2004: 74)

Pengarang merespon kesewenang-wenangan penguasa yang telah merampas tanah dan menggusur rumah dengan menggalang kekuatan agar rakyat bersatu melakukan perlawanan dan menggentarkan penguasa.

Respon pengarang terhadap kejahatan yang dilakukan penguasa, dalam bentuk kesewenang-wenangan penguasa dalam membungkam kemerdekaan bersuara, merampas tanah, dan menggusur rumah adalah
commit to user

melawan. Pengarang melakukan perlawanan dan mengancam pemberontakan terhadap perlakuan penguasa yang sewenang-wenang, serta tidak segan-segan menggalang kekuatan guna menggentarkan penguasa agar ia mau mendengarkan kemauan rakyat serta keluh kesah rakyat, khususnya rakyat miskin yang mengenyam penderitaan akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

3. Respon pengarang terhadap masalah generasi muda pada masyarakat modern

Masalah generasi muda umumnya ditandai oleh keinginan-keinginan untuk melawan. Sikap melawan tersebut mungkin disertai dengan suatu rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan menyimpang (Soerjono Soekanto, 1994: 413). Dalam kumpulan puisi *Aku Ingin Jadi Peluru*, ditemukan problem sosial mengenai sikap melawan terhadap pemerintahan. Sikap melawan tersebut ditujukan pengarang terhadap penguasa pada zaman Orde Baru. Bahasa-bahasa perlawanan tersebut tampak dalam penggalan-penggalan puisi berikut.

a. Peringatan

apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan !

(Wiji Thukul, 2004: 77)

commit to user

b. Nyanyian Akar Rumput

kami rumput
butuh tanah
dengar !
Ayo gabung ke kami
Biar jadi mimpi buruk presiden !

(Wiji Thukul, 2004: 9)

c. Sajak Suara

suara-suara itu tak bisa dipenjarakan
di sana bersemayam kemerdekaan
apabila engkau memaksa diam
aku siapkan untukmu: pemberontakan !

sesungguhnya suara itu akan menjadi kata
ialah yang mengajari aku bertanya
dan pada akhirnya tidak bisa tidak
engkau harus menjawabnya
apabila engkau tetap bertahan
aku akan memburumu seperti kutukan

(Wiji Thukul, 2004: 74)

d. Bunga dan Tembok

jika kami bunga
engkau adalah tembok
tapi di tubuh tembok itu
telah kami sebar biji-biji
suatu saat kami akan tumbuh bersama
dengan keyakinan: engkau harus hancur !

dalam keyakinan kami
di man pun –tirani harus tumbang!

(Wiji Thukul, 2004: 73)

Berdasarkan penggalan-penggalan puisi di atas, pengarang merespon bahwa perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang

commit to user

dilakukan pemerintah memang perlu dilakukan. Sebagai rakyat kecil, kita tidak boleh tinggal diam jika terjadi ketidakadilan. Pengarang sebagai pelaku perlawanan tersebut merasa dirinya perlu memperjuangkan apa yang telah menjadi haknya dan orang-orang yang senasib dengannya.

Kesewenang-wenangan pemerintah dalam merampas tanah, mengusur rumah rakyat, mengekang kebebasan berbicara, memberikan kebijakan-kebijakan yang mempersulit kehidupan rakyat kecil seperti menaikkan harga BBM dan munculnya penggunaan bis kota yang menggeser penghasilan tukang becak, dinilai pengarang sebagai langkah-langkah pembangunan yang menyengsarakan rakyat. Dengan adanya kebijakan pembangunan gedung-gedung dan pelebaran jalan tersebut, membuat rakyat kehilangan rumah dan tanah mereka. Keberadaan bis kota, membuat para tukang becak tergeser keberadaannya, sehingga hal itu berdampak pada perekonomian keluarga tukang becak yang mempunyai penghasilan semakin sedikit, sehingga untuk mencukupi kebutuhan primer keluarga, mereka harus rela berhutang kepada rentenir. Belum lagi adanya kenaikan harga BBM yang semakin menambah rentetan penderitaan rakyat miskin, karena kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan solusi untuk meringankan beban rakyat miskin.

Dengan adanya hal-hal tersebut, pengarang tidak tinggal diam. Ia beranggapan bahwa apabila pendapat dan keluhan rakyat tidak lagi didengar, bahkan justru *admitted to user* dituduh bersikap subversif, maka dengan cara

melawan dan melakukan pemberontakan adalah cara yang tepat untuk membuat penguasa mau mendengar dan mengindahkan apa yang diinginkan rakyat.

